

Menggaungkan Pendekatan Ekologis dalam Historiografi Perkotaan di Indonesia Pasca Reformasi

Ronal Ridhoi^{1*}

¹Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Indonesia

Email: ronal.ridhoi.fis@um.ac.id*

*Korespondensi

Abstrak

Kajian historiografi perkotaan pasca Reformasi cenderung mengalami perubahan yang signifikan. Dari yang sebelumnya menyoal permasalahan sosial ekonomi di kawasan pedesaan, kemudian menyoal kehidupan sehari-hari di perkotaan. Tulisan ini mencoba menunjukkan adanya pendekatan lain dalam penulisan historiografi perkotaan di Indonesia. Dengan melakukan pembacaan mendalam (*bibliographical research*) terkait historiografi yang telah dihasilkan sebelum dan sesudah Reformasi, penulis mencoba menarasikan gagasan baru terhadap historiografi perkotaan. Tulisan ini menunjukkan bahwa historiografi perkotaan yang diproduksi pasca Reformasi menunjukkan tren perubahan ke arah permasalahan lingkungan di perkotaan. Hal ini disebabkan karena tren permasalahan lingkungan dan krisis iklim pasca Reformasi lebih disorot oleh para akademisi. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan ekologi dalam penelitian sejarah kota merupakan bidang baru yang harus dieksplorasi lebih lanjut.

Kata Kunci: historiografi; pendekatan ekologi; perkotaan; reformasi

Abstract

Urban historiographical studies after the Reformation tend to make a significant changes. From the previous question about socio-economic problems in rural areas, then questioned daily life in urban areas. This paper tries to show that there are other approach on the urban history writing in Indonesia. By perusing some books and articles (*bibliographical research*) related to urban historiography before and after the Reformation period, the author tries to narrate new ideas on urban historiography. This paper shows that urban historiography produced after the Reformation shows a trend of change towards environmental problems in urban areas. This is due to the trend of post-reform environmental problems and climate crises being highlighted by academics. This paper shows also that ecological approach on the urban history research is a new field that should be explored further.

Keywords: ecological approach; historiography; reform; urban



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Studi sejarah kota dapat dikatakan sebagai bidang garapan baru bagi historiografi Indonesia pasca kolonial. Sebelumnya, fokus kajian sejarah dititikberatkan pada sejarah sosial tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Dalam hal ini, sejarah gerakan sosial dan pemberontakan yang terjadi di daerah pedesaan menjadi bidang yang banyak dikaji oleh sejarawan. Selain masalah perlawanan dan gerakan sosial, historiografi sejarah pedesaan juga

mengkaji kehidupan sosial masyarakat pedesaan, kebudayaan, dan sistem politiknya. Pada perkembangan berikutnya, sehubungan dengan modernisasi dan munculnya kota-kota kolonial di Indonesia, maka terjadi pergeseran spasial tentang kajian sejarah kota. Fokus kajian yang pada awalnya banyak sejarah pedesaan kemudian bergeser ke sejarah perkotaan.

Keunikan kota telah menarik perhatian akademisi untuk mengkajinya. Beragam pengetahuan lahir dari realitas perkotaan, seperti sosiologi perkotaan, antropologi perkotaan, arsitektur perkotaan, tata kota, sejarah perkotaan, politik perkotaan, dan lain-lain. Pada perkembangannya muncul berbagai literatur yang menghimpun berbagai pengetahuan yang berbasis perkotaan. Di Indonesia kajian perkotaan merupakan hal baru. Kajian ini lahir pada periode akhir kolonialisme Belanda di Indonesia. Periode tersebut merupakan periode pertumbuhan kota-kota di Indonesia yang berkembang akibat praktek liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi telah mendorong pertumbuhan kota-kota di Indonesia menjadi kota modern sebagai basis kegiatan perekonomian. Berbagai kota telah berubah dari sekedar pusat pemerintahan menjadi pusat perdagangan dan industri. Akibatnya, berbagai persoalan sosial, ekonomi, bahkan politik muncul di perkotaan. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian para pemerhati perkotaan (Basundoro, n.d.).

Kajian tentang sejarah kota merupakan topik yang tidak akan pernah habis dikupas oleh para sejarawan. Sejarah kota tidak hanya menyajikan suatu kota dengan sistem politik, ekonomi, bangunan kuno dan kondisi sosial masyarakatnya, tapi juga bagaimana upaya manusia mempengaruhi lingkungan kota dan sebaliknya. Upaya tersebut yang kemudian menghasilkan kawasan baru, tempat baru, dan sifat masyarakat yang baru pula. Itu semua dapat dikaji dengan pendekatan ekologis, khususnya yang menyangkut perubahan ekologi kota.

Kuntowijoyo menyebutkan bahwa permasalahan mengenai ekologi kota menjadi salah satu titik fokus penelitian bagi sejarah kota. Terdapat lima titik fokus penelitian sejarah kota, yaitu: perkembangan ekologi kota, transformasi sosial ekonomis, sistem sosial, problem sosial, dan mobilitas sosial (Kuntowijoyo, 2003). Kelima titik fokus tersebut dapat dijadikan acuan untuk menentukan tema dan permasalahan sejarah kota yang akan dibahas. Sejarah kota secara umum terlalu luas kajiannya jika tidak memilih salah satu fokus kajian di atas.

Jika beranjak dari beberapa fokus kajian yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo di atas maka historiografi tentang sejarah kota di Indonesia telah mengalami ketidakseimbangan. Selama ini, sejarawan Indonesia lebih memfokuskan penelitiannya terhadap kondisi sosial-ekonomis, sejarah ekonomi, sistem sosial, permasalahan sosial di pinggiran kota, politik dan administrasi perkotaan, dan mobilitas sosial penduduk kota. Kajian tentang ekologi kota masih belum banyak dikaji oleh sejarawan Indonesia. Kebanyakan yang mengkaji ekologi kota dan sejarah lingkungan perkotaan di Indonesia yaitu sejarawan, antropolog, dan ahli perkotaan yang berasal dari luar negeri. Hal itu menunjukkan kurangnya minat sejarawan dalam negeri terhadap permasalahan ekologis kota. Sejarawan lebih suka melihat kota sebagai wadah untuk melakukan dokolonisasi terhadap historiografi sebelumnya yang cenderung Eropasentris.

Seperti yang diungkapkan oleh Freek Colombijn bahwa sejarah dekolonisasi Indonesia sebenarnya lebih dari sekedar sejarah politik. Dekolonisasi juga menyajikan peristiwa-peristiwa tentang perubahan sosial, ekonomi, dan kultural.

Perubahan-perubahan tersebut kebanyakan terjadi di perkotaan (Colombijn, et al., 2015). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kota-kota di Indonesia mempunyai arti penting pada masa kolonial dan pasca kolonial. Sayangnya, kajian tentang dekolonisasi di perkotaan tersebut cenderung kaku dan terlihat adanya dendam historiografis terhadap kolonialisme.

Agar historiografi sejarah kota tidak kaku dan hanya menampilkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat, maka sejarawan perlu menggunakan pendekatan lain. Pendekatan yang ditawarkan dalam makalah ini yakni pendekatan ekologis. Hal ini merupakan cara untuk menyeimbangkan historiografi sejarah kota di Indonesia yang cenderung bermuatan sosial, ekonomi, dan politik. Harus ada pendekatan baru yang lebih realistis ketika melihat fenomena perkotaan, karena tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor ekologis yang juga berubah seiring perkembangan kota. Dengan menggunakan pendekatan ekologis maka historiografi sejarah kota di Indonesia akan menunjukkan keunikan tersendiri. Keunikan tersebut dapat dilihat dari kondisi lingkungan alam yang mempengaruhi masyarakat dan juga sebaliknya, mengingat negeri ini mempunyai sumber daya alam dan keindahan alam yang luar biasa.

Pada dasarnya, penelitian tentang ekologi kota dapat membantu mengisi kesenjangan ekologi yang sebelumnya jarang diperhatikan. Pendekatan ekologi kota sangat bervariasi, misalnya studi tentang populasi manusia kota, sejarah kebudayaan, spasial dan lokasi geografis kota. Prinsip dari pendekatan ini mengacu pada kondisi geografis dan kenampakan ekologis kota (McDonnell, Hahs and Breuste, 2009, p. 3). Oleh karena itu, melalui makalah ini penulis ingin menunjukkan bahwa pendekatan ekologis penting untuk dijadikan fokus penelitian sejarah kota di Indonesia. Tujuan penulisan makalah ini yaitu agar historiografi sejarah kota di Indonesia tidak hanya didominasi oleh penulisan terhadap permasalahan sosial, ekonomi, dan politik semata. Sejarah kota juga harus dikaji dengan pendekatan lain, yaitu pendekatan ekologis. Hal itu perlu dilakukan karena permasalahan yang ada di perkotaan pasca Reformasi tidak semata-mata permasalahan sosial, ekonomi, dan politik saja, melainkan juga permasalahan ekologis.

Pergeseran Historiografis

Gideon Sjoberg memaparkan perkembangan kota di berbagai belahan dunia. Ia menyimpulkan bahwa semua kota-kota yang sekarang ini menjadi kota besar dulunya merupakan peradaban desa yang berada di sekitar sungai-sungai besar. Lokasi peradaban awal tersebut dijelaskan mulai dari kawasan Mesopotamia (Sungai Eufrat dan Tigris), Meso-Amerika, Mesir (Sungai Nil), Asia Selatan (Sungai Indus), sampai Sungai Huang Ho di Cina (Sjoberg, 1955). Pendapat Sjoberg tersebut pada dasarnya mempunyai kekuatan karena peradaban manusia ribuan tahun yang lalu memang dikaitkan dengan air sebagai sumber kehidupan. Dalam hal ini daerah sekitar sungai menjadi kawasan penting bagi terciptanya peradaban.

Selain itu, Supratikno Rahardjo seorang arkeolog UI juga mengkaji kota-kota di Indonesia beserta kebudayaannya. Ia juga menyimpulkan bahwa kota itu tidak langsung ada seperti yang kita lihat pada saat ini. Kota mengalami proses perkembangan panjang yang bermula dari peradaban desa. Dalam bukunya Kota-kota Prakolonial Indonesia (Pertumbuhan dan Keruntuhan), dijelaskan bahwa kota prakolonial tumbuh dari kota tradisional terlebih dahulu dan belum mengenal

industri. Kota prakolonial juga dapat disebut dengan desa. Ciri-ciri desa dalam hal ini masih bersifat subsisten dan dapat mencukupi kebutuhan sendiri dengan cara melakukan usaha-usaha pertanian (Rahardjo, 2007). Kajian yang ditulis Rahardjo ini masih menunjukkan perspektif sosial-politik yang kuat. Perkembangan kota masih belum dilihat dengan perspektif ekologis.

Sejak tahun 1960an, Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Sartono Kartodirdjo juga memelopori penulisan tentang sejarah pedesaan di Indonesia. Sartono melihat desa-desa, khususnya di Jawa pada abad ke-19, sebagai kajian yang eksotis dan menarik. Hal itu dikarenakan pada periode tersebut telah terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap pedesaan di Jawa sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan pemerintah kolonial. Oleh sebab itu, selain karya monumentalnya tentang pemberontakan petani di Banten tahun 1888, Sartono juga menulis *Protes Movement in Rural Java* yang diterbitkan tahun 1973. Buku tersebut mengkaji model-model pemberontakan yang ada di pedesaan Jawa. Walaupun kajiannya terkesan sosial-ekonomi tapi buku tersebut juga dapat dijadikan rujukan awal untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat pedesaan pada masa kolonial (Kartodirdjo, 1966, 1973).

Mencoba sedikit bergeser dari historiografi sejarah pedesaan. Seorang antropolog Amerika Serikat, Clifford Geertz dalam *Mojokuto: Dinamika Sosial sebuah Kota di Jawa*, mencoba melihat sebuah kota kecil (kota kecamatan/town) di Kediri, Jawa Timur dengan perspektif antropologis. Fokus kajiannya yaitu permasalahan sosial-budaya yang ada di Kecamatan Pare, Kediri. Geertz menjelaskan dengan detail latar belakang pedesaan dan perkotaan, perkembangan pedesaan dan perkotaan, serta dampak sosial yang terjadi dalam masyarakat (Geertz, 1986). Hal itu dilakukan karena Geertz ingin mencari sifat-sifat sosio-antropologis dan menjadikan tulisannya lebih mengarah pada penulisan sejarah sosial.

Selanjutnya, historiografi tentang sejarah kota-kota masa kolonial mulai bermunculan. Dengan ditetapkannya *Decentralisatie Wet 1903* maka perkembangan kota kolonial di Indonesia mulai terlihat. Pauline Dubline Milone menjelaskan secara kronologis perkembangan kota di Indonesia. Ia memfokuskan kajiannya pada perkembangan administrasi pengelolaan kota. Ia memulai penjelasannya dari periode sebelum diterapkannya undang-undang desentralisasi di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan penerapan *Desentralisatie Wet 1903*. Ia juga menjelaskan kota pada periode penjajahan Jepang dan diakhiri dengan pembahasan periode kemerdekaan sampai tahun 1960-an (Milone, 1966). Bagian akhir buku tersebut memuat data-data kuantitatif tentang perkembangan status kota serta data demografi yang sangat lengkap yang merupakan hasil sensus penduduk tahun 1930 dan tahun 1961. Buku yang ditulis Milone tersebut masih menggunakan perspektif politik, karena pembahasannya terfokus pada kebijakan-kebijakan dan administrasi politik pemerintah.

Beberapa tulisan di atas merupakan karya historiografi yang menunjukkan pergeseran dari sejarah desa ke sejarah kota. Dengan adanya hal ini bukan berarti sejarah pedesaan akan digantikan keseluruhan oleh sejarah kota. Sampai saat ini, sejarah pedesaan masih tetap dikaji oleh beberapa sejarawan, tapi dengan menggunakan perspektif yang berbeda. Pergeseran spasial tersebut pada dasarnya terjadi karena mobilitas yang tinggi di kawasan perkotaan akibat industrialisasi dan

pertumbuhan ekonomi-bisnis yang ada di perkotaan. Kajian sejarah pedesaan saat ini lebih difokuskan pada permasalahan tanah (sejarah agraria), yang membahas sengketa tanah dan pemberontakan. Padahal, kajian mengenai desa jika dilihat dari perspektif ekologisnya juga akan menemukan hal baru yang menarik. Misalnya, kajian mengenai perbedaan sejarah ekologi desa yang terletak di lereng gunung (dataran tinggi) dan desa yang terletak di pesisir (dataran rendah). Hal itu menjadi menarik ketika sejarawan bisa menemukan pengaruh lingkungan terhadap sifat, karakter, dan kebudayaan masyarakat di desa yang berbeda tersebut.

Dari Pemerintah Kota hingga Gembel Kota

Awal abad ke-20 merupakan kemunculan kota-kota baru yang mempunyai otonomi tersendiri di setiap wilayah di Indonesia. Dengan dikeluarkannya Decentralisatie Wet 1903 mengakibatkan munculnya kota-kota otonom, yang kemudian disebut dengan Gemeente. Sistem pemerintahan Gemeente ini sudah terlepas dari intervensi pemerintah kolonial yang berpusat di Batavia. Gemeente berhak mengelola sendiri sistem pemerintahan, politik, sosial, dan ekonomi kota itu sendiri. Hal ini menyebabkan tingginya migrasi orang-orang Eropa ke gemeente yang ada di Indonesia. Permasalahan baru mulai muncul di sana. Segregasi, diskriminasi, perebutan ruang kota, dan kemiskinan semakin bertambah. Peristiwa-peristiwa ini yang kemudian menjadi bidang garapan baru bagi sejarawan yang memusatkan perhatiannya pada kota-kota di Indonesia.

Reza Hudiyanto dalam bukunya *Menciptakan Masyarakat Kota: Malang di Bawah Tiga Penguasa*, memaparkan sistem pemerintahan Gemeente Malang, yang merupakan sebuah kota pedalaman di Jawa Timur. Malang secara resmi ditetapkan menjadi gemeente pada tahun 1914. Dalam bukunya dibahas sistem pemerintahan kota dalam tiga periode, yaitu periode kolonial, penjajahan Jepang, dan periode kemerdekaan. Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan bagaimana perkembangan penggunaan ruang kota dalam tiga periode tersebut. Di akhir buku ini juga terdapat penjelasan mengenai perjuangan politik kaum bumiputera di Malang dan pengaruhnya dalam sistem pemerintahan kota (Hudiyanto, 2011).

Masih berhubungan dengan ruang kota, Johan Silas, seorang Guru Besar Arsitektur di ITS Surabaya mencoba memaparkan bagaimana sejarah permukiman di Indonesia sekitar abad ke-20. Dalam artikel *Perjalanan Panjang Perumahan Indonesia dalam dan Sekitar Abad XX*, ia menjelaskan perkembangan pola dan jenis perumahan yang ada di Indonesia akibat aglomerasi kota dan pertumbuhan penduduk kota. Kepadatan lahan kota disertai pertambahan penduduk yang cukup signifikan mengakibatkan dibangunnya perumahan. Ia mengategorikan sistem pengadaan perumahan kota ke dalam tiga pola. Pertama, perumahan yang dibangun oleh swasta yang diperuntukkan bagi para penduduk kaya di perkotaan. Kedua, perumahan dinas yang bangun untuk golongan pegawai negeri dan pegawai swasta. Ketiga, perumahan yang dibangun oleh perorangan dan lokasinya berada di perkampungan (pinggiran kota). Silas juga memaparkan permasalahan yang timbul akibat penggunaan ruang kota sebagai perumahan tersebut (Colombijn, et al., 2015).

Sementara itu di daratan Sumatra Barat, Zulqayyim sejarawan Universitas Andalas mencoba memfokuskan perhatiannya terhadap perkembangan infrastruktur kota di luar Jawa, yaitu Bukittinggi masa kolonial Belanda. Dalam

bidang ekonomi, focus perhatiannya terkait bagaimana pasar di Bukittinggi dibangun dengan dua konsep, yaitu pasar atas dan pasar bawah. Dalam bidang pendidikan, dijelaskan juga berbagai sekolah yang ada di Bukittinggi, seperti Sekolah Raja, MULO, HIS, Europeesche School, dan HCS yang masih tetap digunakan sampai saat ini. Tidak hanya itu, pembahasan terkait infrastruktur lain seperti Jam Gadang, Kebun Binatang, dan kompleks tentara (bidang pertahanan kota) juga tidak absen dari pembahasannya (Zulqaiyyim, 2006). Berbeda dengan Jean Gelman Taylor yang menulis Kota Jakarta (Batavia) masa kolonial. Ia menelaah sejarah Kota Batavia dari awal pendudukan VOC abad ke-17 sampai awal abad ke-20 dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial (sejarah sosial). Taylor menganalisis pembentukan, perkembangan, interaksi masyarakat, dan hilangnya beberapa kelompok masyarakat yang turut membentuk masyarakat kolonial di Batavia, yaitu orang-orang Mestizo (Indo-Eropa) dengan kebudayaan indisnya (Taylor, 2009).

Beberapa model historiografi tersebut menggunakan pendekatan sosial-politik. Setelah model historiografi tentang politik perkotaan dan infrastrukturnya, maka kali ini penulis memaparkan historiografi sejarah kota yang menggunakan perspektif sejarah sosial. Tulisan Bambang Purwanto Kekerasan dan Kriminalitas di Kota pada saat Transisi: Kotagede, Yogyakarta pada Akhir Masa Kolonial dan Awal Kemerdekaan, secara tegas menjelaskan adanya kekacauan di Kotagede, Yogyakarta pada periode Revolusi. Kekerasan dan kriminalitas di Kotagede tersebut merupakan akibat dari kesulitan ekonomi penduduk yang terjadi pada masa penjajahan Jepang. Penduduk Kotagede di beberapa tempat mulai kehilangan solidaritas sosial mereka, dan akhirnya emosi pun menjadi tidak terkontrol. Akibatnya, mereka cenderung menjadi brutal dan menunjukkan sikap serta perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional mereka. Pada saat masyarakat harus berhadapan dengan krisis, maka perilaku dan tindakan mereka tidak sejalan dengan nilai-nilai dan identitas yang selama ini mereka tunjukkan pada kalangan luar. Kekerasan dan kriminalitas ternyata menjadi bagian dari realitas sejarah masyarakat kota di Kotagede, walaupun memori kolektif dan sejarah yang mereka ingat selama ini mengingkari adanya kekerasan dan kriminalitas yang pernah terjadi (Colombijn, et al., 2015).

Model selanjutnya dari historiografi sejarah kota yaitu model yang menggunakan perspektif sosial-ekonomi. Dalam hal ini, La Ode Rabani merupakan salah satu orang yang memelopori penulisan sejarah kota daratan Sulawesi di Indonesia bagian timur. Berbagai karyanya tentang Buton, Bau-bau, Kendari, dan Wakatobi dapat dijadikan contoh historiografi sejarah kota yang menggunakan perspektif sosial-ekonomis. Rabani melihat perkembangan beberapa kota tersebut sebagai kota yang strategis karena lokasinya berada di Kawasan pesisir Sulawesi Tenggara. Salah satu contoh yaitu Kota Buton, yang dijadikan pelabuhan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1920. Hal itu dilakukan karena pada saat itu ditemukan tambang aspal dan juga kawasan penghasil kayu jati berkualitas. Kondisi tersebut dapat menguntungkan perekonomian pihak kolonial yang saat itu menjadi colonizer di negeri ini. Penemuan tambang tersebut membuat pemerintah kolonial membangun berbagai infrastruktur untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Berbagai infrastruktur yang dibangun seperti jalan raya, industri, pasar, dan sebagainya. Kajian La Ode Rabani ini menunjukkan bahwa kota tidak hanya dilihat dari segi sosialnya saja tetapi juga segi ekonomis yang sangat

menguntungkan (Colombijn, et al., 2015; Rabani, 2016; Rabani, Purwanto, & Margana, 2020).

Beralih dari model sosial-ekonomi, model selanjutnya yaitu posmodernisme. Seperti yang didengungkan oleh para penganutnya, bahwa sejarah itu terkesan mengkaji segala hal yang bersifat mapan. Posmodern yang dalam hal ini merupakan aliran yang kritis dan mengutamakan kesetaraan menginginkan historiografi sejarah kota di Indonesia tidak hanya dilihat dari sudut pandang politik, sosial, dan ekonomi. Sejarah kota harus ditulis berdasarkan sejarah kehidupan sehari-hari dari lingkup informal sekalipun. Seperti permasalahan feminisme, gaya hidup, memori kolektif dan juga permasalahan kemiskinan di sebuah kota. Oleh sebab itu, akhir-akhir ini mulai bermunculan tulisan-tulisan tentang sejarah kota yang dilihat dari perspektif posmodern.

Dwi Ratna Nurhajarini menulis sejarah kota dari perspektif posmodernisme. Artikelnya yang berjudul *Kain Kebaya dan Rok: Pakaian Perempuan Yogyakarta Awal Abad ke-20*, memberikan wacana baru bagi historiografi sejarah kota. Nurhajarini memfokuskan perhatiannya terhadap gaya berpakaian perempuan dalam lingkup lokal, yakni di Kota Yogyakarta pada periode awal abad ke-20. Pilihan kota ini didasarkan bahwa pada saat itu Yogyakarta menjadi kota tempat tumbuh beberapa organisasi sosial-politik baik dalam skala lokal maupun nasional. Selain itu, Yogyakarta merupakan pusat yang menjadi panutan dalam tata cara berpakaian menurut adat Jawa, yakni pakaian keraton. Perubahan mulai terjadi ketika kehidupan gaya Barat mulai merambah masuk ke Yogyakarta. Hal itu disertai dengan kemajuan dalam bidang fasilitas pendukung kota, seperti industrialisasi, komunikasi dan transportasi (Margana & Nursam, 2010, pp. 117–130).

Lamijo juga memusatkan perhatian terhadap perempuan di perkotaan. Dalam artikel *Perempuan Publik dari Masa ke Masa: Studi Historis Prostitusi di Jakarta 1930-1959*, Lamijo menjelaskan secara historis perkembangan prostitusi sejak jaman kolonial sampai pasca kemerdekaan. Kemunculan prostitusi ini disebabkan karena faktor ekonomi masyarakat yang pada saat itu mengalami keadaan yang miskin dan terpuruk akibat kolonialisme, penjajahan Jepang, sampai pada masa Revolusi. Akibatnya, prostitusi terus berkembang sampai pada masa Orde Lama, bahkan sampai saat ini prostitusi menjadi mata pencaharian bagi sebagian perempuan di ibukota. Di akhir artikelnya, Lamijo memaparkan dampak yang ditimbulkan akibat maraknya prostitusi tersebut. Banyak lelaki, khususnya tentara Hindia-Belanda yang meninggal karena terkena penyakit kelamin akibat berganti-ganti pasangan dan melakukan hubungan seks yang tidak steril (Abdullah & Abdurrachman, 2011, pp. 367–406).

Abidin Kusno melihat sejarah kota dari perspektif lain, yaitu bersumber dari memori kolektif terhadap bangunan gardu. Menurutnya gardu merupakan bangunan yang tidak boleh dikesampingkan dalam perkembangan kota-kota di Indonesia. Embrionya yang berasal dari tempat istirahat dan tempat mengganti kuda di sekitaran Jalur Pos Daendels kemudian mengalami perubahan fungsi pada masa Jepang dan pasca kemerdekaan. Bahkan pada masa Orde Baru dan setelahnya, gardu mulai dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu (Kusno, 2007). Hal yang sama dipaparkan oleh Sarkawi B. Husein dalam *Mereka Tidak Bisu: Makna dan Perebutan Simbol Monumen, Patung, dan Tugu di Kota Surabaya*. Ia menjelaskan bahwa monumen, tugu, dan patung merupakan tanda dan sekaligus digunakan sebagai

ingatan kolektif yang menandai periode penguasa tertentu. Husein mencoba melihat beberapa elemen yang ada di perkotaan tersebut sebagai tanda yang bermuatan politis (Abdullah & Abdurrachman, 2011, pp. 3–36).

Terakhir, penulis mengambil model historiografi dari buku *Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960*, yang ditulis oleh Purnawan Basundoro. Dalam buku tersebut Purnawan Basundoro menjelaskan bagaimana kondisi rakyat miskin di Surabaya yang semakin tersingkir dari hiruk-pikuk Kota Surabaya sebagai kota metropolitan kedua setelah Jakarta. Dari kondisi tersebut rakyat miskin di Surabaya tidak kemudian menyerah begitu saja, mereka mengambil alih tanah-tanah partikelir dengan melakukan gerakan protes terhadap para tuan tanah. Setelah tahun 1930-an, semakin banyak rakyat miskin Surabaya yang tidak mempunyai rumah dan mereka terpaksa menjadi pengemis. Dalam hal ini penulis mengidentikkan istilah pengemis dengan sebutan “gembel”. Fenomena “gembel” ini terus berkembang hingga tahun 1960-an. Bagi mereka yang kalah bersaing dalam hal pekerjaan dan tidak mempunyai tempat tinggal, maka mereka terpaksa harus menjadi “gembel” yang hidup di jalan. Bahkan setelah tahun 1960-an, Purnawan Basundoro menjelaskan semakin banyaknya “gembel” yang membuat tempat tinggal (rumah) di pemakaman Belanda dan Cina yang ada di Surabaya (Basundoro, 2018).

Memikirkan kembali Historiografi Perkotaan di Indonesia Pasca Reformasi

Telah dipaparkan di atas beberapa model historiografi tentang sejarah kota di Indonesia. Keseluruhan model di atas menggunakan pendekatan sosial, ekonomi, dan politik. Walaupun pada perkembangan selanjutnya, dengan munculnya aliran posmodernisme, penulisan sejarah kota menjadi lebih beragam. Banyak objek-objek kajian yang “menyimpang” dari kajian yang sudah ada. Misalnya saja kajian tentang ekonomi kota, sejarawan posmodernis tidak lagi berbicara kota sebagai wadah untuk melangsungkan kegiatan ekonomi formal. Perekonomian kota dikaji dari sudut pandang informal, seperti munculnya pedagang kaki lima, prostitusi, cara berpakaian, dan sebagainya. Hal itu semua merupakan bidang garapan baru, tapi sekali lagi masih belum ada upaya untuk menggunakan pendekatan ekologis.

Penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa kritik terhadap model historiografi sejarah kota di Indonesia tersebut. Pertama, sejarawan terlalu memungkiri adanya pengaruh lingkungan terhadap masyarakat di kota. Sejarah kota terkesan sejarah yang ditulis untuk warga atau masyarakat kota saja. Padahal peran lingkungan alam juga sangat menentukan masyarakat kota tersebut. Lingkungan dapat mempengaruhi kebudayaan, sifat, watak, dan karakter setiap orang. Misalnya saja, orang yang kehidupan sehari-harinya tinggal di daerah pesisir pantai akan berbeda sifat dan karakternya dengan orang yang hidup di pedalaman/pegunungan yang berbasis agraris. Hal ini juga penting untuk dikaji dalam historiografi sejarah kota, khususnya tentang masyarakat kota pesisir dan kota pedalaman.

Kedua, historiografi sejarah kota kebanyakan berbicara antara yang benar dan yang salah, yang menang dan yang kalah. Periode kolonialisme dalam hal ini mendapat perhatian penuh dari sejarawan. Hal itu dikarenakan pada periode tersebut seorang sejarawan kota bisa berbicara eksploitasi manusia, perkebunan, tambang, dan perdagangan yang notabene dilakukan oleh pihak colonizer. Dengan

demikian posisi penduduk semakin tertindas dan terpinggirkan, sementara posisi colonizer berada pada puncak kekuasaan dan menjadi pihak yang diuntungkan. Kondisi tersebut yang mengakibatkan adanya kategorisasi peran bahwa penduduk pribumi sebagai pihak yang benar tetapi kalah, sementara colonizer berada pada pihak yang menang tetapi disalahkan. Historiografi seperti itu akan terus berlanjut jika sejarawan tidak bisa menghentikan keinginannya untuk menyalahkan dan memojokkan pihak colonizer. Padahal, seperti yang telah diketahui bahwa dengan adanya kolonialisme eksploitasi tersebut secara tidak langsung pemerintah kolonial membangun infrastruktur transportasi (seperti jalan raya dan jalur kereta api) yang tetap digunakan sampai sekarang.

Ketiga, historiografi sejarah kota masih bermuatan dekoloniasasi. Perlu diingat bahwa upaya dekolonisasi sebenarnya akan membawa arah penulisan sejarah kota di Indonesia ini kepada penulisan sejarah lokal. Sejarah kota tidak hanya berbicara lokalitas, tetapi juga berbicara masalah peristiwa masyarakat yang global dan menuju pada kosmopolitan. Dengan hal ini maka historiografi sejarah kota dapat dikaitkan dengan gejala-gejala yang mendunia. Jika sejarawan dapat memosisikan kota sebagai wilayah yang global dan kosmopolit, maka tidak akan terjadi pembalasan atau dendam historiografi. Dekolonisasi secara tidak langsung dapat menimbulkan dendam historiografi. Sebuah dendam historiografi pada akhirnya tidak akan menjadikan pembahasan mengenai kota dan keunikan di dalamnya sebagai pokok kajian yang global dan kosmopolit.

Keempat, aliran posmodern yang mencoba mencari ide-ide dan bidang garapan baru bagi historiografi sejarah kota ternyata belum menunjukkan kesetaraan. Aliran posmodernisme dalam mengkaji sejarah kota masih cenderung menggunakan pendekatan sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Mungkin hal itu sudah dapat dianggap sebagai upaya untuk menyetarakan masyarakat bawah dan penguasa di kota. Sebenarnya, kesetaraan di sini tidak hanya membandingkan ketiga hal tersebut. Perlu adanya kajian yang membahas ekologi kota dan sejarah lingkungan kota yang keduanya juga saling berinteraksi dengan masyarakat kota.

Kelima, sejarawan mengesampingkan ekologi kota yang selama ini telah berinteraksi dengan manusia untuk membentuk ruang-ruang kota yang baru. Berberapa model historiografi di atas terlalu berbicara tentang ruang kota sebagai produk dari interaksi manusia dengan manusia, manusia dengan materi, dan manusia dengan kebudayaannya. Pengaruh lingkungan masih sedikit dibahas dalam beberapa historiografi tersebut. Padahal, pembentukan dan perubahan ruang kota sangat ditentukan oleh kondisi ekologis kota tersebut. Apakah berurusan dengan ketersediaan lahan ataupun letak geografis kota yang berada di pesisir, pedalaman, dataran rendah, dataran tinggi, DAS (Daerah Aliran Sungai), maupun lingkungan yang lain.

Sekedar meminjam kata-kata Abidin Kusno dalam kata pengantar Politik Kota, Sejarah Kota dalam buku Pengantar Sejarah Kota, "sejarah kota harus mengutamakan proses daripada hasil sebuah kota, memperlihatkan manusianya daripada penguasanya, membandingkan ruang kota dan mencari hubungan waktu daripada narasi perkembangan kota. Maksudnya mungkin adalah menantang penulisan sejarah kota yang konvensional sambil mengundang cerita yang lebih beragam, yang tidak hanya memperlihatkan pahit atau manisnya masa lalu dan sulitnya masa sekarang" (Basundoro, 2012). Oleh sebab itu, penulis mencoba untuk

menggagas pendekatan lain untuk historiografi sejarah kota di Indonesia. Penulis tidak membahas metodologi mana yang baik dan benar terhadap sejarah kota. Penulis juga tidak mengunggulkan pendekatan ekologi dan mengesampingkan pendekatan yang lain. Dalam makalah ini penulis mencoba untuk menawarkan pendekatan ekologis bagi historiografi perkotaan di Indonesia. Untuk mengenal lebih dalam pendekatan tersebut maka perlu diketahui terlebih dahulu apa itu sejarah lingkungan (*environmental history*) dan pendekatan ekologis (*ecological approach*).

Environmental History and Ecological Approach

Environmental history atau sejarah lingkungan merupakan bidang garapan sejarah yang belum lama ini banyak diperbincangkan. Baru-baru ini mulai banyak yang mengkaji karena banyaknya permasalahan yang menitikberatkan pada fenomena lingkungan di negeri ini yang menarik untuk diteliti (Nawiyanto, 2012, 2017, 2017). Bencana banjir di perkotaan misalnya, sudah sejak 10 tahun yang lalu tulisan tentang sejarah banjir di kota-kota besar (seperti Jakarta, Semarang, Surabaya) dan kota-kota kecil (seperti Bangkalan, Sampang, Situbondo) telah menarik perhatian para sejarawan. Tulisan sejarah banjir yang dimaksud adalah peristiwa banjirnya dan upaya mitigasi oleh pemerintah dan masyarakat (Gunawan, 2010; Nawiyanto, 2012; Priyanto & Nawiyanto, 2014; Husain, 2016; Cahyaningrum, 2020; Ridhoi et al., 2021). Fenomena banjir selain bermanfaat bagi pembaruan historiografi Indonesia juga bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan tata guna lahan. Banjir dan penyelesaiannya juga dapat dikaji dari sudut pandang historis untuk menggambarkan bagaimana peristiwa banjir bisa terjadi dan mengapa terjadi. Demikian juga permasalahan hutan, lingkungan maritim, dan bencana alam pada dasarnya juga dapat dilihat dari sudut pandang historis (Nawiyanto, 2012).

Konsep sejarah lingkungan di Indonesia digagas oleh Peter Boomgard, Freek Colombijn, dan beberapa sejarawan lainnya dalam *Environmental History of Indonesia*, yang berupa kumpulan artikel (bunga rampai) tentang Indonesia lainnya. Hal ini dapat dilihat dari buku yang berjudul *Paper Landscapes: Explorations in the Environmental History of Indonesia*. Dalam buku tersebut, Boomgard menjelaskan tentang pengertian sejarah lingkungan, khususnya yang ada di Indonesia. Selain itu, ia juga menjelaskan fokus-fokus kajian yang ada dalam studi sejarah lingkungan. Sementara, para penulis yang lainnya menjelaskan degradasi lahan, populasi tumbuhan dan binatang, penyakit, perburuan, industri maritim, deforestasi (penggundulan hutan), ekologi politik dalam historiografi, dan sebagainya (Boomgard, Colombijn, & Henley, 1997).

Sejarah lingkungan dalam hal ini dapat diidentikkan dengan sejarah ekologi. Kajian ini merupakan spesialisasi baru bagi historiografi di Indonesia. Sejarah lingkungan adalah studi mengenai hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungan. Manusia menggunakan pengaruh lingkungan tersebut untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah terjadinya perubahan lingkungan. Perubahan ini yang nantinya akan menjadi pemicu utama atau objek penelitian sejarah lingkungan. Pada dasarnya determinisme lingkungan akan mempengaruhi berbagai jenis masyarakat yang ada dalam suatu negara (Boomgard, Colombijn, & Henley, 1997, pp. 1-2).

Fokus kajian sejarah lingkungan meliputi beberapa hal. Pertama, permasalahan lingkungan itu sendiri. Perubahan lingkungan selalu disertai perubahan masyarakat dan juga perubahan iklim. Permasalahan yang dibahas pada fokus kajian yang pertama ini adalah seputaran tanah (lahan), iklim, vegetasi tumbuhan dan hewan, serta kepadatan populasi. Hal yang paling utama dari penelitian sejarah lingkungan ini adalah landscape. Kedua, pertumbuhan populasi penduduk. Hal ini dapat dijadikan fokus kajian sejarah lingkungan karena nantinya akan berhubungan dengan permasalahan land used dalam suatu wilayah. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan populasi penduduk tersebut terhadap lingkungan yang ditempatinya (Boomgard, Colombijn, & Henley, 1997).

Ketiga, permasalahan penyakit dalam suatu lingkungan tertentu dapat dikaji lebih lanjut. Penyakit di sini dapat disebabkan dari dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor non-manusia. Faktor yang kedua tersebut menunjukkan adanya hubungan dari penyakit yang disebabkan oleh iklim dan lingkungan yang buruk. Misalnya, iklim tropis dapat mengakibatkan penyebaran penyakit seperti cacar air, kolera, pes, dan sebagainya (Boomgaard, 1993, 2003). Keempat, kajian yang tidak kalah pentingnya yaitu masalah pembersihan lahan dan deforestasi (penggundulan hutan). Permasalahan ini biasanya terjadi pada daerah-daerah yang memiliki lahan kosong dan hutan yang cukup luas. Seiring berkembangnya perindustrian, maka lahan kosong dan hutan tersebut mulai banyak yang dibersihkan dan dijadikan lokasi industri. Hutan juga dapat diteliti dari sudut pandang yang lain, misalnya produk hutan dan konservasi hutan (Pratama, 2016). Kajian ini menarik untuk diterapkan di Indonesia mengingat masih banyak lahan-lahan produktif dan juga hutan belantara yang terdapat di berbagai wilayah di Indonesia.

Kelima, yaitu masalah kekuatan eksternal yang mempengaruhi lingkungan alam di sebuah negara. Kekuatan eksternal ini misalnya perdagangan luar negeri (free trade), orang asing, tanaman-tanaman baru dan penyakit-penyakit baru yang dibawa oleh orang-orang asing tersebut (Boomgaard, 1993). Beberapa hal tersebut dapat mempengaruhi dan dapat menyebabkan perubahan ekologis. Terakhir, permasalahan sikap atau penilaian juga dapat mempengaruhi perubahan lingkungan. Selama ini telah berkembang pandangan bahwa orang Barat mempunyai sikap destruktif terhadap alam, sementara orang Timur hidup harmonis dengan alam (Diamond, 2005). Perbedaan pandangan mengenai sikap manusia terhadap lingkungan tersebut dapat dikaji dalam tuda sejarah lingkungan.

Sejarah lingkungan (*environmental history*) dan sejarah ekologi (*ecological history*) pada dasarnya memiliki kesamaan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sejarah lingkungan itu mengkaji hubungan manusia dan lingkungannya. Begitu juga dengan sejarah ekologi, embrio dari istilah ekologi sebenarnya sudah ada sekitar abad ke-16/17. Pada saat itu di Eropa muncul istilah Natural History yang kemudian berkembang menjadi ilmu yang sistematis, analitis, dan objektif. Ilmu tersebut membahas hubungan organisme (mahluk hidup) dengan lingkungannya. Kemudian, pada abad selanjutnya lebih dikenal dengan istilah ekologi. Nama ekologi dicetuskan oleh Earnst Haeckel pada tahun 1860-an (Irwan, 1992, p. 3). Sebelum tahun 1970, ekologi dianggap sebagai cabang biologi dan didefinisikan sebagai kajian organisme dalam kaitannya dengan lingkungan. Namun, sekarang ekologi muncul sebagai disiplin ilmu sendiri yang mengintegrasikan organisme, lingkungan fisik dan manusia. Oleh karena itu, secara istilah ekologi diterjemahkan sebagai

kajian lingkungan, termasuk seluruh penduduk didalamnya dimana mereka hidup dan kita tempatkan struktur buatan dan hewan-tanaman yang telah didomestikasi (Eblen & Eblen, 1994, p. 339). Jadi, sejarah lingkungan (*environmental history*) dan sejarah ekologi (*ecological history*) dapat diartikan sebagai hubungan atau interelasi manusia dengan lingkungannya dengan disertai perubahan-perubahannya yang terjadi di masa lalu.

Penulis mencoba menggaungkan lagi pendekatan ekologis untuk diterapkan dalam historiografi perkotaan di Indonesia pasca Reformasi. Pendekatan ekologi untuk melihat fenomena lingkungan kota-kota di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik. Lingkungan tidak hanya dinilai sebagai pihak yang pasif, melainkan juga aktif mempengaruhi masyarakat dalam usaha merubah ruang kota. Hal itu perlu mendapatkan perhatian dari para sejarawan agar tidak mengkaji keunikan kota dari perspektif sosial, ekonomi, budaya, dan politik semata. Penulis mengambil contoh disertasi dari F.A. Sucipto tahun 1983 berjudul Kota-Kota Pantai di Sekitar Selat Madura Abad XVII Sampai Medio Abad XIX, yang menjelaskan sejarah kota-kota di sekitar Selat Madura menggunakan pendekatan sosial-ekonomi. Melihat tema tersebut maka terpikir di benak penulis untuk menelaah kota-kota di Pantai Selatan Jawa dengan menggunakan pendekatan ekologis. Kota lebih dilihat pada permasalahan ekologisnya yang memungkinkan suatu kota bisa berkembang dalam hal ekonomi, politik, dan kebudayaan karena dideterminasi lingkungan alamnya. Kondisi ekologis daerah selatan Pulau Jawa yang cenderung dikelilingi pegunungan dan batuan karang menjadikan kota-kota di daerah ini kurang berkembang dalam bidang perekonomian. Ini adalah bukti bahwa pendekatan ekologis juga penting untuk menelaah kota-kota pantai di Indonesia.

Studi tentang ekologi kota di Indonesia masih belum banyak menyita perhatian sejarawan dalam negeri. Kebanyakan yang melakukan studi ekologi kota merupakan sejarawan dari luar Indonesia. Seperti Peter J.M. Nas, Mark Caljouw, dan Pratiwo dalam studi sejarah kota mengenai permasalahan banjir di Jakarta memberikan model baru bagi historiografi sejarah kota di Indonesia. Mereka membahas pengelolaan air di Jakarta dengan didasarkan pada sejarah akan lokasi kota yang sejak dulu berada di kawasan yang rendah. Mereka mencoba menarik ke belakang mengenai sejarah Jakarta pada saat menjadi Pelabuhan Sunda Kelapa kemudian menghubungkannya dengan kondisi saat ini. Bahkan, pembahasan juga diakhiri dengan pemberian solusi terhadap banjir di Jakarta yang terjadi setiap tahun tersebut (Nas, et al., 2007, pp. 13–40). Hal ini menarik, karena sejarah kota dikaji dengan pendekatan ekologis yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat, baik bagi masyarakat maupun lingkungan itu sendiri.

Pendekatan ekologi dalam sejarah kota juga digunakan oleh Luc Nagtegaal dan Peter Nas untuk melihat perubahan lingkungan di Kota Jakarta. Mereka memfokuskan pada berbagai bentuk kawasan hijau di kota dan perannya terhadap kelangsungan pembangunan di Jakarta. Pertama, penelitian dilakukan pada ruang-ruang terbuka hijau di Jakarta berdasarkan latar belakang pembangunan historis kota tersebut dan mempertimbangkan konsep perencanaan yang relevan dengan proses ini. Setelah itu, melakukan peninjauan terhadap penggunaan tanah dan melakukan distribusi kawasan hijau dalam lahan kota. Nagtegaal dan Nas juga mendiskusikan tipe-tipe penting dari kawasan hijau kota, yaitu taman kota, lahan kosong, bandara, makam, lapangan golf, tanah pertanian, dan daerah resapan air.

Tujuan akhir dari penelitian tersebut yaitu mempelajari kebijakan pemerintah daerah yang ada saat ini untuk mempertahankan dan meningkatkan kawasan hijau di Jakarta dan alasan kenapa kebijakan tersebut harus tetap dijalankan (Nas, et al., 2007, pp. 373–374). Tulisan tersebut sekali lagi menjadikan bukti bahwa pendekatan ekologi untuk historiografi sejarah kota dapat digunakan untuk mengawal kebijakan pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk kota.

Ekologi sebagai sebuah pendekatan nantinya bisa memunculkan studi tentang ekologi kota (*urban ecology*). Studi tersebut telah banyak dikembangkan oleh ahli-ahli ekologi dari Amerika dan Eropa. Mereka meneliti lingkungan kota di Amerika dan Eropa yang mayoritas sudah lama menjadi kawasan urban. Menurut Richard Forman terdapat tiga kategori untuk memudahkan kajian tentang wilayah urban dan lingkungan alam. Pertama, yaitu kajian mengenai lahan (tanah, pertamanan, perkebunan), kota berkelanjutan (pembangunan berkelanjutan), dan bencana alam. Kedua, yaitu kajian mengenai perubahan iklim, kepunahan spesies, dan kelangkaan air yang merupakan tantangan besar bagi ekologi di kota-kota besar. Ketiga, ide-ide, peraturan dan kebijakan pemerintah dalam upaya untuk mengelola lingkungan kota (Forman, 2008, p. 315). Beberapa kategori tersebut dapat dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian sejarah kota di Indonesia dengan menggunakan pendekatan ekologis.

Ekologi perkotaan adalah studi tentang ekosistem yang mencakup manusia yang tinggal di kota-kota beserta perubahan lanskapnya. Kajian ini merupakan sesuatu yang baru dengan studi interdisipliner yang bertujuan untuk memahami bagaimana manusia dan lingkungannya. Proses hidup berdampingan antara manusia dan alam juga mendapat dukungan dari beberapa disiplin ilmu termasuk sosiologi, geografi, perencanaan kota, arsitektur lanskap, teknik, ekonomi, antropologi, klimatologi, kesehatan masyarakat, dan ekologi. Karena sifat interdisipliner dan fokus yang unik pada manusia dan sistem alam, istilah ekologi perkotaan telah digunakan untuk menggambarkan studi tentang manusia di perkotaan, lingkungan alam di perkotaan, dan hubungan keduanya (Marzluff, et al., 2008, p. vii).

Jadi, jelas sekali bahwa pendekatan ekologis dalam historiografi sejarah kota tidak bisa dikesampingkan. Studi-studi interdisipliner yang ditawarkan oleh pendekatan ekologi merupakan jalan di mana sejarah dapat disejajarkan dengan ilmu-ilmu alam, walaupun kebenaran atau realitas yang dihasilkan nantinya bersifat subjektif. Sejarawan seharusnya bisa menempatkan sejarah ekologi atau sejarah lingkungan sebagai kajian utama seperti halnya sejarah sosial, politik, dan ekonomi. Walaupun sejarah lingkungan ini relatif baru, penulis yakin bahwa dalam perkembangannya nanti kajian ini akan diminati banyak kalangan. Kemungkinan tersebut mempunyai peluang besar mengingat kondisi ekologis di berbagai tempat di seluruh wilayah Indonesia sangat beragam dan mempunyai keunikan tersendiri.

Kesimpulan

Kajian sejarah kota sejak Reformasi hingga saat ini telah banyak ditulis oleh para sejarawan. Kota tidak hanya dilihat dari proses perkembangan dan perubahannya, tetapi juga dilihat dari peristiwa yang paling kecil dan sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berarti pendekatan sejarah kota telah

mengalami pergeseran dari yang pertama kali selalu memfokuskan para penguasa dan kebesarannya (formal), kini bergeser ke sektor yang lebih kecil (informal) dan terjangkau dalam hal yang dianggap sederhana. Fenomena tersebut telah terjadi akhir-akhir ini dan kerap kali disebut-sebut sebagai kajian posmodernisme. Walaupun demikian, kajian posmodernisme tersebut masih belum bisa melepaskan diri dari pendekatan sosial, ekonomi, dan politik, karena memang kesetaraan dalam berbagai bidang tersebut yang diinginkan oleh kalangan posmodernis.

Kemunculan studi sejarah lingkungan atau sejarah ekologi dapat menutupi keterbatasan kalangan posmodernis tersebut. Studi tentang sejarah ekologi kota perlu ditekankan, khususnya yang memfokuskan kajian terhadap kota-kota di Indonesia. Studi yang menggunakan pendekatan ekologi tersebut dapat memperkaya khazanah historiografi sejarah kota di Indonesia. Terlebih lagi jika yang melakukan penelitian tentang sejarah kota adalah sejarawan-sejarawan dalam negeri. Beberapa literatur sebelum Reformasi menunjukkan bahwa kebanyakan yang mengkaji fenomena kota di Indonesia dengan pendekatan ekologi adalah para sejarawan dari luar Indonesia. Meski demikian, sejarawan dari dalam negeri dalam kurun waktu 10-15 tahun ke belakang sudah memulainya dengan pendekatan ekologi perkotaan.

Historiografi sejarah kota di Indonesia harus menunjukkan keseimbangan dan tidak berat sebelah. Jika selama ini telah banyak menggunakan pendekatan sosial, ekonomi, dan politik, maka historiografi juga harus diseimbangkan dengan menggunakan pendekatan ekologi. Tujuannya agar historiografi sejarah kota di Indonesia menjadi menarik dan beragam. Keseimbangan historiografi tersebut juga akan menghapuskan dendam-dendam sejarawan terhadap kolonialisme yang telah terjadi di negeri ini. Dekolonisasi bukan ajang untuk membenarkan dan menyalahkan, tetapi lebih pada penekanan mengenai perbedaan karakter historiografi Indonesia dan historiografi Barat. Pendekatan ekologi tersebut diharapkan dapat mengurangi dendam-dendam historiografi yang terjadi. Akhirnya, pendekatan ekologi dapat digunakan sebagai alternatif bagi penulisan sejarah kota-kota di Indonesia.

Referensi

- Abdullah, T. & Abdurrachman, S. (eds) (2011). *Indonesia across orders: arus bawah sejarah bangsa, 1930-1960*, (No Title). Jakarta: LIPI Press.
- Basundoro, P. (2012). *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Ombak.
- Basundoro, P. (2017). Kajian Tentang Sejarah Perkotaan di Indonesia Pada Masa Kolonial Sampai Awal Kemerdekaan. In *Menemukan Historiografi Indonesiasentris*. Margarana, S., Sekarningrum, R., Faisol, A. (Editor). Yogyakarta: Ombak.
- Basundoro, P. (2018). *Merebut ruang kota: aksi rakyat miskin Kota Surabaya 1900-1960an*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Basundoro, P. (n.d.) *Dari Realitas Kota Menjadi Realitas Pengetahuan: Sebuah Catatan Historiografis*, *academia.edu*. https://www.academia.edu/8291556/DARI_REALITAS_KOTA_MENJADI_REALITAS_PENGETAHUAN_SEBUAH_CATATAN_HISTORIOGRAFIS (Accessed: 17 July 2023).

- Boomgaard, P. (1993). The development of colonial health care in Java; An exploratory introduction. *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 149(1), 77-93. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003137>.
- Boomgaard, P. (2003). Smallpox, vaccination, and the Pax Neerlandica, Indonesia, 1550-1930. *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 159(4), 590-617. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003743>.
- Boomgaard, P., Colombijn, F. & Henley, D. (1997). *Paper landscapes: Explorations in Environmental History of Indonesia*. Leiden: KITLV Press Leiden.
- Cahyaningrum, G.A. (2020). *Bencana Banjir di Pulau Madura 1875-1940*. Surabaya: Pustaka Indis.
- Colombijn, F. et al. (2015). *Kota lama, kota baru: Sejarah kota-kota di Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak.
- Diamond, J. (2005). *Collapse: How States Choose to Fail or Succeed*. New York: Penguin Group.
- Eblen, R.A. & Eblen, W.R. (1994). *The encyclopedia of the environment*. Boston: Houghton Mifflin.
- Forman, R. T. T. (2008). *Urban regions: Ecology and planning beyond the city*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511754982>.
- Fulbrook, M. (2003). *Historical theory*. New York: New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203450659>.
- Gaddis, J.L. (2002). *The landscape of history: How historians map the past*. Oxford University Press.
- Geertz, C. (1986). *Mojokuto: dinamika sosial sebuah kota di Jawa*. Jakarta: Pustaka Grafiti Perss. Jakarta: Grafiti Press.
- Gunawan, R. (2010). *Gagalnya sistem kanal: pengendalian banjir Jakarta dari masa ke masa*. Penerbit Buku Kompas.
- Handinoto (2012). *Sejarah Kota Probolinggo 1746-1940: ditinjau dari sudut bentuk dan struktur kotanya*. Probolinggo: Museum Probolinggo.
- Hudiyanto, R.R. (2011). *Menciptakan masyarakat kota: Malang di bawah tiga penguasa 1914-1950*. Yogyakarta: Penerbit Lilin.
- Husain, S. B. (2016). Banjir, Pengendaliannya, dan Partisipasi Masyarakat Di Surabaya, 1950-1976(Flood Control and People's Participation in Surabaya, 1950-1976). *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18(1), 65-80. <https://doi.org/10.14203/jmb.v18i1.341>.
- Irwan, Z. D. (1992). *Prinsip-prinsip ekologi dan organisasi ekosistem komunitas dan lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartodirdjo, S. (1966). *The peasants' revolt of Banten in 1888*. (P. 392). Brill.

- Kartodirdjo, S. (1973). *Protest movements in rural Java: A study of agrarian unrest in the nineteenth and early twentieth centuries*. Oxford University Press Singapore.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Margana, S. & Nursam, M. (eds) (2010). *Kota-kota di Jawa: identitas, gaya hidup, dan permasalahan sosial*. Yogyakarta: Ombak.
- Marzluff, J. M. et al. (2008). *An international perspective on the interaction between humans and nature*. Springer Science and Business Media, New York..
- McDonnell, M. J., Hahs, A. K. & Breuste, J. H. (2009). *Ecology of cities and towns: A comparative approach, Ecology of Cities and Towns: A Comparative Approach*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511609763>.
- Milone, P. D. (1966). *Urban areas in Indonesia: administrative and census concepts*. Berkeley: Institute of International Studies.
- Nas, P. J. M. (1986). *The Indonesian city: studies in urban development and planning*. Cinnaminson: Foris Publication.
- Nas, P. J. M. et al. (2007). *Kota-kota Indonesia: bunga rampai*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Nawiyanto. (2012). Bencana dan Pelestarian Lingkungan: Pandangan Etnik Jawa dan Madura di Wilayah Ujung Timur Jawa. *Paramita: Historical Studies Journal*, 22(1), 41-55. <https://doi.org/10.15294/paramita.v22i1.1843>.
- Nawiyanto. (2012). *Pengantar sejarah lingkungan*. Jember: Jember University Press.
- Nawiyanto. (2017). *Penulisan Sejarah Lingkungan di Indonesia*. Margarana, S., Sekarningrum, R., Faisol, A. (Editor). Yogyakarta: Ombak.
- Nawiyanto. (2017). *Sejarah Lingkungan Sebagai Historiografi Alternatif*. Malang.
- Pratama, A. R. (2016). *Eksplorasi hutan di Kalimantan Timur pada masa Orde Baru, 1970-1998*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Priyanto, E. H. & Nawiyanto. (2014). Banjir Bandang di Kodya Semarang tahun 1990. *Publika Budaya*, 2(3), 9-17. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/PB/article/view/1523>.
- Rabani, L. O. (2016). Penyelundupan dan Terbentuknya Kawasan Ekonomi Maritim Wakatobi Tahun 1980-an. *Lembaran Sejarah*, 12(2), 132-143. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33463>.
- Rabani, L. O., Purwanto, B. & Margana, S. (2020). Politik dan Ekonomi di Dua Kota: Baubau dan Kendari pada tahun 1950an-1960an. *Mozaik Humaniora*, 20(1), 39-56. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15746>.
- Rahardjo, S. (2007). *Kota-kota prakolonial Indonesia: pertumbuhan dan keruntuhan*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Ridhoi, R., et al. (2021). *Sejarah Banjir Sampang, 1872-2020*. Malang: Java.
- Sjoberg, G. (1955). The preindustrial city. *American Journal of Sociology*, 60(5), 438-445. <https://doi.org/10.1086/221603>.

Ronal Ridhoi/Menggaungkan Pendekatan Ekologis dalam Historiografi Perkotaan di Indonesia
Pasca Reformasi

Taylor, J. G. (2009). *Kehidupan Sosial di Batavia: Orang Eropa dan Eurasia di Hindia Timur*. Masup Jakarta.

Zulqaiyyim. (2006). *Boekittinggi Tempo Doeloe*. Padang: Universitas Andalas Press.